

## Pengungkapan Risiko Keuangan Perbankan Dilihat dari *Corporate Governance*

Himmatu Sholikhah<sup>1</sup>, Shinta Permata Sari<sup>2\*</sup>,

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Prodi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*e-mail: [Shinta.Sari@ums.ac.id](mailto:Shinta.Sari@ums.ac.id)<sup>2</sup>, [ima4amimaqu@gmail.com](mailto:ima4amimaqu@gmail.com)<sup>1</sup>

### *Abstract*

#### **Keywords:**

*Financial risk disclosure; proportion of the independent commissioners; expertise of audit committee; ownership concentration; and auditor's reputation.*

*Banking sector is one of economics sectors that support the rapid improvement on economic growth, but the economic instability make banking companies inseparable from financial risk. In order to maintain business continuity, banking companies must carry out good corporate governance to represent financial risk disclosure as a priority preview for stakeholders. This study analyze the effect of corporate governance proxies by proportion of the independent commissioners, expertise of audit committee, ownership concentration, and auditor's reputation on financial risk disclosure. The purposive sampling methods use to classify the banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018 which consist of 42 banks. The multiple linear regression uses to analyze the data and the results indicate that auditor's reputation effects on financial risk disclosure. Meanwhile, proportion of the independent commissioners, expertise of audit committee and ownership concentration have no effect on financial risk disclosure.*

### **1. PENDAHULUAN**

Setiap aktivitas ekonomi pada dasarnya senantiasa memerlukan peranan sektor keuangan, mulai dari aktivitas di perbankan hingga aktivitas di pasar modal. Sektor keuangan yang kuat dan stabil dapat membantu mempercepat transaksi ekonomi sehingga dapat mengurangi biaya transaksi. Kekuatan sektor keuangan juga menjadi syarat yang sangat penting untuk meminimalkan tekanan perekonomian pada saat terjadi krisis. Kemajuan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kemajuan sektor keuangannya. Oleh karena itu, peran sektor keuangan sangat penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara, sehingga perkembangan sektor keuangan menjadi perhatian para pengambil kebijakan.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Siringoringo, 2012).

Dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (2019) Sistem keuangan Indonesia dihadapkan pada tiga sumber kerentanan utama yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan apabila terekspos dampak *shock* yang berasal dari kondisi perekonomian dan keuangan global. Kerentanan pertama dan

kedua mencerminkan permintaan sumber pendanaan dari domestik, sedangkan kerentanan ketiga menggambarkan karakteristik penyediaan dana bagi domestik.

Kerentanan pertama adalah meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal korporasi, khususnya dari luar negeri. Seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian domestik dan relatif menariknya tingkat suku bunga global, pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) sebagai sumber pendanaan aktivitas, baik di tingkat korporasi, nonkeuangan maupun keuangan, semakin meningkat. Peningkatan ULN tersebut berpotensi meningkatkan risiko pasar, baik sebagai akibat perubahan nilai tukar maupun suku bunga. Korporasi keuangan dan nonkeuangan memitigasi risiko yang ditimbulkan dari kerentanan tersebut, antara lain melalui aktivitas lindung nilai (*hedging*) sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan implementasi *hedging* bagi korporasi nonbank yang memiliki ULN.

Kerentanan kedua muncul akibat ketergantungan bank pada retail funding (sumber dana ritel). Sejalan dengan tingginya konsumsi masyarakat dan meningkatnya aktivitas perekonomian, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh melambat secara persisten. Sebagai akibatnya, retail funding atau DPK kurang memadai untuk menopang penyaluran kredit yang pertumbuhannya jauh lebih tinggi dan berpotensi menahan ekspansi kredit apabila perbankan tidak meningkatkan pemanfaatan sumber dana lain selain DPK. Merespons perkembangan tersebut, perbankan dapat mencairkan alat likuidnya yang selanjutnya berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas. Respon lainnya adalah perbankan meningkatkan *wholesale funding* sebagai alternatif sumber dana untuk pembiayaan kredit dan agar risiko likuiditas tetap terjaga. Jenis *wholesale funding* yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2018 terutama pembiayaan dari eksternal atau ULN.

Ketiga, kesenjangan negatif antara tabungan dan investasi membutuhkan

keberlangsungan pendanaan dari modal asing. Pendanaan tersebut terutama berasal dari investasi portofolio, sehingga cukup rentan terhadap sentimen negatif dan berpotensi menimbulkan risiko pasar dan tekanan kepada perekonomian. Kurang dalamnya pasar keuangan Indonesia berpotensi mengamplifikasi sumber kerentanan tersebut. Oleh karena itu, Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait lainnya berupaya untuk meningkatkan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman, agar pasar keuangan dapat berperan maksimal dalam mendukung pembiayaan ekonomi.

Paparan mengenai kerentanan sistem keuangan di Indonesia seharusnya membuat perusahaan perbankan mempersiapkan manajemen perusahaan dengan tata kelola perusahaan. Melalui tata kelola yang baik diharapkan perbankan mampu menunjukkan tingkat risiko dalam menghadapi kondisi fluktuasi ekonomi, sehingga para pemangku kepentingan memiliki gambaran umum tentang kondisi perusahaan. Selain itu, perbankan juga mampu memberikan jaminan tentang keberlanjutan usahanya.

### 1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan yang terdapat di perusahaan berbentuk kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam mengelola penggunaan dan pengendalian sumberdaya perusahaan. Kontrak tersebut mengatur hak dan kewajiban pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Adanya kontrak tersebut dapat memicu konflik yang diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Konflik tersebut dikenal dengan konflik keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk meredam konflik keagenan adalah dengan mengawasi perilaku manajer sehingga kepentingan-kepentingan tersebut dapat diseimbangkan.

Teori keagenan dan pengungkapan risiko saling berhubungan, dimana risiko pada umumnya dikaitkan dengan ketidakpastian, sedangkan teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman dalam pengungkapan risiko. Informasi yang dimiliki oleh pihak agen merupakan informasi yang mencakup seluruh kondisi perusahaan dan lebih akurat dibandingkan dengan *stakeholder*, padahal informasi tersebut dibutuhkan oleh para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Pihak agen sudah seharusnya menyediakan informasi yang lengkap dan akurat terkait risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Rifani dan Astuti (2019) jika pihak *stakeholder* tidak memperoleh informasi secara keseluruhan, maka pengambilan keputusan akan menjadi berbeda, dan mungkin akan berdampak buruk dan merugikan bagi semua pihak terkait. Pengungkapan laporan tahunan perusahaan dapat menjadi alat bantu untuk menghindari asimetri informasi. Pengungkapan risiko yang baik diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi *stakeholder*, serta mengurangi konflik yang terjadi antara principal dengan agen.

## 1.2. Teori Sinyal

Teori ini muncul karena adanya permasalahan asimetri informasi yang terjadi dari pihak *stakeholder* dengan pihak manajemen. Dalam teori sinyal mengemukakan bahwa perusahaan tergerak untuk melakukan suatu keterbukaan informasi kepada pihak luar (Setiawan, 2016).

Perusahaan menggunakan teori sinyal untuk mendapatkan suatu reputasi perusahaan dan disertai dengan nilai perusahaan yang meningkat. Pengungkapan risiko keuangan akan menunjukkan suatu sinyal yang baik dikarenakan perusahaan telah menerapkan prinsip transparan informasi yang merupakan prinsip *corporate governance* (Zakiyah dan Gunawan, 2017).

Menurut Dey, *et al.* (2018) Perusahaan dapat mengungkapkan secara

sukarela untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat percaya bahwa perusahaan beroperasi dalam sistem nilai sosial. Singkatnya teori ini memiliki implikasi untuk pengungkapan risiko keuangan dalam arti perusahaan harus menilai, mengelola dan mengungkapkan risiko kepada pemegang saham sesuai dengan teori agensi, mengungkapkan manajemen risiko dan pengambilan keputusan berdasarkan teori sinyal.

## 1.3. Pengungkapan Risiko Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017) sebagai adopsi dari *International Financial Reporting Standards (IFRS) 7, Financial Instruments: Disclosures*, (Cabedo dan Tirado, 2004; Wibowo dan Probahudono, 2017) risiko keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Risiko kredit merupakan risiko yang mana salah satu pihak akan mengalami kerugian instrumen keuangan terhadap pihak lain yang diakibatkan oleh kegagalan dalam membayar kewajiban.
2. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi ketika entitas kesulitan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Risiko ini dapat diselesaikan dengan cara menyerahkan kas atau aset lainnya.
3. Risiko pasar merupakan risiko yang mana terjadi fluktuasi nilai wajar suatu instrumen keuangan. Risiko ini disebabkan adanya perubahan harga pasar. Risiko pasar dibagi menjadi tiga, yaitu:
  - a. Risiko suku bunga, yaitu terjadinya fluktuasi arus kas masa depan instrumen keuangan perusahaan akibat perubahan suku bunga.
  - b. Risiko mata uang asing, yaitu terjadinya fluktuasi nilai wajar suatu instrumen keuangan perusahaan akibat perubahan nilai valas

- c. Risiko harga lainnya, yaitu terjadinya fluktuasi arus kas masa depan instrumen keuangan perusahaan akibat faktor lain selain suku bunga dan mata uang asing.

#### 1.4. Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) pada tahun 2008 telah mengatur tentang penyelesaian masalah tata kelola perusahaan di Indonesia dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Perspektif ini bermaksud menyelesaikan *agency problem* yang dihadapi oleh perusahaan dengan pemegang saham yang tersebar. Kebutuhan perusahaan atas tata kelola beragam dimana pada dasarnya diyakini bahwa perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang baik dapat bertahan terhadap guncangan pada kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, isu penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* masih hangat dan menarik perhatian para ekonom dan pelaku bisnis di Indonesia saat ini dalam upaya menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan. Ada beberapa pengukuran dalam tata kelola perusahaan dan dalam penelitian ini menggunakan proksi proporsi dewan komisaris independen, keahlian komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan reputasi auditor.

#### 1.5. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/pojk.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, bank wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dean komisaris lain, atau hubungan dengan bank yang

dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen penting agar dewan komisaris dapat bertindak secara lebih independen dan tidak memihak kepentingan perusahaan.

Perusahaan dianggap perlu untuk memberikan informasi mengenai proporsi dewan komisaris independen, karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko reputasi pribadi mereka. Dengan demikian, tingkat pengungkapan yang lebih tinggi diharapkan dari perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya agensi, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lebih luas (Wardhana dan Cahyonowati, 2013; Sari dan Sholikhah, 2019).

**H<sub>1</sub>:** Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.

#### 1.6. Keahlian Komite Audit

Komite audit sebagaimana dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, beranggotakan paling sedikit 1(satu) orang komisaris independen, 1(satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1(satu) orang independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Dengan latar belakang kompetensi akuntansi yang dimiliki, keberadaan komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan membantu dalam pengendalian dan pengawasan perusahaan secara efektif (Falendro et al., 2018).

**H<sub>2</sub>:** Keahlian komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.

### 1.7. Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan berarti suatu kepemilikan saham yang lebih dominan di dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu maupun institusi. Dengan adanya persentase kepemilikan yang besar, maka akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan manajemen dalam mengambil sebuah keputusan, meminimalkan biaya agensi, serta melakukan peningkatan dalam peran pengawasan program manajemen risiko secara efektif (Agista dan Mimba, 2017; Oktavia dan Isbanah, 2019).

H<sub>3</sub>: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.

### 1.8. Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan nama besar yang dimiliki auditor atas prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor. Investor lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti, 2007). Perusahaan akan mencari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimata pemakai laporan keuangan itu (Halim, 1997 dalam Widyanti dan Badera, 2016).

H<sub>4</sub>: Reputasi Auditor berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.

## 2. METODE

### 2.1. Populasi, dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan (*annual report*) dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria dalam pemilihan sampel yaitu:

**Tabel 1.** Proses Seleksi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018	45
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada tahun 2016-2018	(3)
Sampel perusahaan yang memenuhi kriteria		42
Total sampel penelitian = 42 perusahaan x 3 tahun		126
Data <i>outliers</i> selama waktu pengolahan		(10)
<b>Total Sampel Penelitian</b>		<b>116</b>

Sumber: data diolah, 2019

### 2.2. Variabel dan Pengukuran Variabel

#### 2.2.1. Pengungkapan Risiko Keuangan

Pengungkapan risiko keuangan atau *financial risk disclosure* (FRD) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *financial risk disclosure index* (FRDI) sebagai ukuran variabel dependen yang mengacu pada penelitian Wibowo dan Probohudono (2017) yang diadaptasi dari penelitian Atanasovski et al. (2015), Oorschot (2010) dan IFRS 7 tentang *Financial Instrument: Disclosure*. FRDI didalam penelitian ini terdiri atas 43 item yang mengacu pada PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017) sebagai adopsi dari IFRS 7. Item didalam FRDI tersebut dibedakan menjadi 3 kategori utama yaitu risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko pasar (*market risk*), dan risiko kredit (*credit risk*). Sesuai dengan IFRS Nomor 7, risiko pasar (*market risk*) juga dapat dibedakan menjadi *currency risk*, *interest rate risk* dan *other price risk*. Perhitungan item-item pengungkapan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item yang diungkapkan diberi nilai 1 dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Pengukuran variabel ini adalah perbandingan item yang

diungkapkan dengan jumlah item yang seharusnya diungkapkan.

### 2.2.2. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proporsi jumlah anggota dewan komisaris yang independen dibanding seluruh jumlah anggota dewan komisaris di suatu perusahaan (Wardhana dan Cahyonowati, 2013; Wibowo dan Probohudono, 2017).

### 2.2.3. Keahlian Komite Audit

Variabel keahlian komite audit diukur dengan proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum terhadap jumlah total anggota komite audit (Falendro *et al.*, 2018).

### 2.2.4. Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan merupakan persentase kepemilikan yang dominan di dalam perusahaan (Agista dan Mimba, 2017; Oktavia dan Isbanah, 2019). Konsentrasi kepemilikan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: Konsentrasi kepemilikan diperoleh dari Kepemilikan saham terbesar (Rp) dibagi dengan Total saham perusahaan (Rp) dikalikan 100%.

### 2.2.5. Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang menggunakan variabel dummy. Jika KAP termasuk dalam kategori berafiliasi dengan KAP asing diberi kode 1, jika tidak diberi kode 0. (Lestari, 2012; Oktavia dan Isbanah, 2019).

## 2.3. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Model dalam penelitian ini adalah :

$$FRD = a + b_1DKI + b_2KKA + b_3KK + b_4KAP + e$$

Keterangan:

FRD = Pengungkapan Risiko Keuangan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

DKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

KKA = Keahlian Komite Audit

KK = Konsentrasi Kepemilikan

KAP = Reputasi Auditor

e = Error

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berdasarkan nilai koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,180 yang artinya 18,0% dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%.

Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai sebesar 0,383 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, yang artinya data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa *Value Inflation Factors* (VIF) antara 1,022-1,065 (dibawah 10) dan *tolerance value* antara 0,939-0,979 (dibawah 1) sehingga tidak terjadi masalah multikolinieritas pada persamaan regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Waston* diperoleh nilai 2,181 berada diantara  $4 - 2,181 < 2,2323$ , sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi antar variabel dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis dengan reresi linear berganda menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	b	Sign.	Keterangan
Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,032	0,572	H <sub>1</sub> ditolak
Keahlian Komite Audit	0,030	0,308	H <sub>2</sub> ditolak
Konsentrasi Kepemilikan	0,048	0,157	H <sub>3</sub> ditolak
Reputasi Auditor	0,067	0,000	H <sub>4</sub> diterima

Sumber : data diolah, 2019

Hasil pengujian Proporsi Dewan Komisaris Independen didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,032 dengan tingkat signifikansi 0,572. Nilai signifikansi lebih dari 5%, maka **H<sub>1</sub> ditolak**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wibowo dan Probahudono (2017). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan. Akan tetapi berdasarkan koefisien regresi dapat diketahui bahwa proporsi dewan komisaris yang semakin besar ternyata mampu meningkatkan pengungkapan risiko keuangan oleh perusahaan perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen yang semakin besar membuat komisaris bertindak diluar kepentingan perusahaan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan secara nyata kepada para pemangku kepentingan.

Hasil pengujian Keahlian Komite Audit didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,030 dengan tingkat signifikansi 0,308. Nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05, maka **H<sub>2</sub> ditolak**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Falendro *et al.*, (2018). Hal ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan. Sesuai dengan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa pada dasarnya keahlian komite audit memiliki kontribusi terhadap

pengungkapan risiko keuangan, meskipun pada kenyataannya sebagian besar perusahaan perbankan menunjuk orang yang tidak memiliki keahlian dibidang ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum sebagai dasar untuk memilih komite auditnya.

Hasil pengujian Konsentrasi Kepemilikan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,048 dengan tingkat signifikansi 0,157. Nilai signifikansi lebih dari 5%, maka **H<sub>3</sub> ditolak**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Oktavia dan Isbanah (2019). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan. Akan tetapi berdasarkan koefisien regresi dapat diketahui bahwa konsentrasi kepemilikan yang semakin besar ternyata mampu meningkatkan pengungkapan risiko keuangan oleh perusahaan perbankan. Meskipun pada kenyataannya tidak ada kepemilikan yang mendominasi perusahaan perbankan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan merupakan jenis perusahaan harus mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga harus dapat memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan agar berkenan menjaga investasinya dalam perusahaan.

Hasil pengujian Reputasi Auditor didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,067 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 5%, maka **H<sub>4</sub> diterima**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Oktavia dan Isbanah (2019). Hal ini menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan. KAP yang berafiliasi dengan KAP asing ternyata mampu memberikan penilaian yang lebih baik tentang pengungkapan risiko keuangan daripada yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. Kondisi ini dimungkinkan karena KAP asing memiliki pengalaman bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia, sehingga mampu memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan tentang risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa tata kelola yang baik akan memberikan gambaran umum kepada pemangku kepentingan tentang risiko keuangan perusahaan. Reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan perusahaan, sedangkan proporsi dewan komisaris independen, keahlian komite audit dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan perusahaan. Pada dasarnya ketiga tinjauan tentang tata kelola perusahaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pengungkapan risiko keuangan perusahaan perbankan, tetapi belum memberikan sumbangan yang nyata. Kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP asing akan mendorong perusahaan perbankan melakukan pengungkapan risiko keuangan secara lebih luas untuk menjaga reputasi perusahaan perbankan dan otomatis menjaga reputasi kantor akuntan publik perusahaan perbankan tersebut.

Penelitian ini berusaha memberikan masukan untuk kebijakan otoritas keuangan berkaitan dengan tata kelola perusahaan guna mendukung pengungkapan risiko keuangan kepada para pemangku kepentingan perusahaan.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/pojk.03/2016, belum menyebutkan jumlah minimal secara pasti untuk komisaris independen, sedangkan berdasarkan penelitian ini jumlah komisaris independen yang semakin besar proporsinya justru akan meningkatkan pengungkapan risiko keuangan perusahaan.
2. Penerapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/pojk.03/2016 tentang keahlian komite audit sudah dijelaskan secara lengkap, akan tetapi pada praktiknya masih banyak perusahaan perbankan yang memiliki anggota komite audit diluar keahlian utama, yaitu dibidang

keuangan, akuntansi, hukum dan perbankan. Perlu dilakukan proses monitoring guna memastikan bahwa keahlian komite audit sesuai dengan keahlian utama, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjamin dan pengungkapan risiko keuangan kepada pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan lebih jelas.

#### REFERENSI

##### Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

- [1] Siringoringo, R. Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*; 2012: 61-83.
- [2] Bank Indonesia. Penguatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. *Kajian Stabilitas Keuangan*; 2019; 32: 1-63.
- [3] Jensen, M.C dan Meckling W.H. Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Accounting Research Autumn*; 1976: 193-228.
- [4] Rifani, D.R dan Astuti, C.D. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Pengungkapan Risiko. *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik*; 2019; 14(1): 1-18.
- [5] Setiawan, D. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan Consumer Goods di BEI Periode 2010-2015. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*; 2016; 10(1): 1-22.
- [6] Zakiyah, Y.N. dan Gunawan, B. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Risk Management Disclosure. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*; 2017; 9(1): 1-18.
- [7] Dey, R.K., Hossain, S.Z. dan Rezaee, Z. Financial Risk Disclosure and Financial Attributes among Publicly Traded Manufacturing Companies: Evidence from Bangladesh. *Journal of Risk and Financial Management*; 2018; 11(50): 1-60.

- [8] Cabedo, J.D., dan Tirado, J.M. The Disclosure of Risk in Financial Statements. *Accounting Forum*; 2004; 28: 181-200.
- [9] Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. 2008. Jakarta: KNKG.
- [10] Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 55/pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 2016. Jakarta: OJK.
- [11] Wardhana, A.A., dan Cahyonowati, N. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*; 2013; 2(3): 1-14.
- [12] Sari, S.P. dan Sholikhah, H. Liquidity Risk Disclosure: A Review Of Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*; 2019; 4(2): 156-164.
- [13] Falendro, A., Faisal, dan Ghozali, I. Karakteristik Dewan Komisaris, Komite dan Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Jurnal Reviu dan Akuntansi Keuangan*; 2018; 8(2): 17-31.
- [14] Agista, G. G., dan Mimba, N. P. S. H. Pengaruh Corporate Governance Structure dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Pengungkapan Enterprise Risk Management. *E-Jurnal Akuntansi*; 2017; 20: 438-466.
- [15] Oktavia, R.A. dan Isbanah, Y. Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Bank Konvensional di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*; 2019; 7(4): 954-965.
- [16] Widyanti, A.A.I. dan Badera I.D.N. Reputasi Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Financial Distress pada Auditor Switching. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*; 2016; 16(3):1800-1828.
- [17] Atanasovski, A., Serafimoska, M., Jovanovski, K., dan Jovevski, D. Risk Disclosure Practices in Annual Reports of Listed Companies: Evidence from a Developing Country. *Research Journal of Finance and Accounting Online*; 2015; 6(1): 2222-2847.

#### Proceedings:

- [18] Wibowo, A. E. dan Probahudono, A.N. Board of Commisisioners, Organizational Culture, dan Financial Risk Disclosure di Indonesia (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XX*. Universitas Jember; 2017: 1-24.
- [19] Praptitorini, M.D., dan Januarti, I. Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X*. Unhas Makassar; 2007: 1-25.

#### Buku

- [20] Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 60 Tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Jakarta: Salemba Empat. 2017.
- [21] Oorschot, L.V.M. *Risk Reporting: An Analysis of the German Banking Industry*. Rotterdam: Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam. 2008. Book Chapter: 147-165.

#### Skripsi, Tesis, Disertasi

- [22] Lestari. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Melakukan Voluntary Auditor Switching. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro; 2012. <http://eprints.undip.ac.id/35291/>